



WALI KOTA BLITAR

- Yth. 1. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

SURAT EDARAN

Nomor : 25 Tahun 2026

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2027**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB III huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati, dengan memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara, dan batas waktu penyampaian RKA-SKPD serta dokumen lampiran pendukung lainnya, dengan ini disampaikan kepada:

1. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk:
 - a. Mengoordinasikan seluruh anggota TAPD dan Tim Teknis Verifikasi untuk melakukan penelaahan dan verifikasi atas RKA-SKPD TA 2027 yang diajukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Memastikan rancangan RKA-SKPD TA 2027 yang disusun telah sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.
 - c. Memeriksa kesesuaian antara indikator kinerja, tolak ukur kinerja dan sasaran kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
 - d. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2027 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2027 berdasarkan RKA SKPD TA 2027 yang telah disempurnakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk:
 - a. Bertanggung jawab penuh dalam penyusunan RKA-SKPD TA 2027.

- b. Mematuhi Plafon Anggaran Sementara untuk Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan.
 - c. Mengisi indikator kinerja dan target capaian secara jelas, realistis dan akuntabel sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
 - d. Memedomani Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Standar Harga Satuan (SHS), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - e. Menyampaikan dokumen RKA-SKPD TA 2027 yang telah ditandatangani kepada TAPD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran ini untuk selanjutnya diproses ke tahap verifikasi.
3. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Plafon Anggaran Sementara untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran dibuat, untuk dijadikan pedoman, ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Blitar
Tanggal, 12 Agustus 2026


WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2027

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2027

A. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Satuan Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2027;
9. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama antara Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar pada tanggal 10 Agustus 2026.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan prinsip:

1. Sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;

3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
6. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat dan dan taat pada ketentuan peraturan perundang undangan; dan
7. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat:

1. Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Daerah
 - 2) Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya yang terdiri atas:
 - 1) Belanja daerah
 - 2) Pengeluaran pembiayaan daerah
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; d. Lain-lain PAD yang Sah.	1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial.

PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH
2. Pendapatan Transfer a. Pendapatan Pemerintah Pusat 1) Dana Otonomi Khusus; 2) Dana Keistimewaan; 3) Dana Desa; 4) Insentif Fiskal; 5) Dana Bagi Hasil (DBH); 6) Dana Alokasi Umum (DAU); 7) Dana Alokasi Khusus (DAK). b. Pendapatan Antar Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan	2. Belanja Modal a. Belanja Tanah; b. Belanja Peralatan dan Mesin; c. Belanja Gedung dan Bangunan; d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; e. Belanja Aset Tetap Lainnya; f. Belanja Aset Lainnya.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah; b. Dana Darurat c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan.
PEMBIAYAAN DAERAH	
1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

D. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Struktur pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) Pajak daerah

Jenis pajak daerah meliputi: pajak reklame, pajak air tanah (PAT), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) - BPHTB Pemindahan Hak, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Opsen PKB, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - Opsen PKB.

2) Retribusi daerah berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4) Lain-lain PAD yang sah, merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain :

(a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;

(b) Jasa Giro;

(c) Pendapatan Bunga;

(d) Pendapatan BLUD;

(e) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

b. Pendapatan Asli Daerah (berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) diperhitungkan berdasarkan pada potensi riil dan realisasi 3 tahun terakhir dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan;

c. Ketentuan terkait jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Insentif Fiskal.

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Meliputi penerimaan dari bagi hasil pajak (pajak penghasilan, PPB dan cukai hasil tembakau) dan sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, kehutanan serta perikanan).

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *earmarked*).

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dibagi menjadi dua kategori, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-fisik. DAK Fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Sementara DAK Non-fisik digunakan untuk mendanai program-program yang bersifat non-infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, tunjangan profesi guru ASN, dan tunjangan penghasilan guru ASN.

4) Insentif Fiskal (IF)

Insentif fiskal ini diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di berbagai bidang, seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional

b. Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan ini mencakup hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar bersumber dari lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

E. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2027 meliputi semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan ketentuan:

1. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar publik dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai kebutuhan daerah;
3. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah, setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar publik;
4. Pemenuhan belanja daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory spending*) antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai dan belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah;
5. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai dan belanja jasa;
6. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek

a. Belanja Pegawai

- 1) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- 3) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium;
- 4) Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;

- b) Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- 5) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (1) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - (3) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; dan
 - (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri atau sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - f) Tunjangan profesi guru ASN daerah dan dana tambahan penghasilan guru ASN daerah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2027 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

- g) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h) Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat/ASN daerah yang melaksanakan tugas pemungutan
 - i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi ASN Daerah, Kepala Daerah dan DPRD;
 - j) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium, rincian obyek belanja dan sub rincian obyek belanja honorarium ASN.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang /jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
 - 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam obyek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain /masyarakat
 - 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai;
 - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
 - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

b) Belanja jasa digunakan untuk mengganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Belanja jasa terdiri dari:

(1) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

- (a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
- (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud dengan memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dengan ketentuan :

- (a) pemberian honorarium kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
- (b) pemberian honorarium Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

(1) Ketentuan pembentukan tim:

- i. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- (i) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - (ii) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- ii. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari
- (2) Honorarium tidak diberikan kepada ASN yang menerima tambahan penghasilan
- (3) Belanja jasa kantor berupa belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia dalam pelaksanaan APBD
 - (a) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
 - (b) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
 - ii. Narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;
 - iii. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
 - iv. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari luar daerah dan diberikan fasilitas berupa transportasi dan akomodasi, maka memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1). surat undangan/permintaan narasumber menjelaskan bahwa transportasi dan/atau akomodasi ditanggung penyelenggara, 2). Biaya transportasi dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai bukti pengeluaran riil yang disampaikan

- (c) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
 - (d) ASN yang dapat diberikan honorarium moderator adalah ASN yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - (e) Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan atau masyarakat;
 - (f) Honorarium pembawa acara tidak diberikan kepada ASN dari SKPD penyelenggara atau ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya;
 - (g) Tidak diberikan honorarium panitia kepada ASN sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.
 - (h) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran pembayaran honorarium;
 - (i) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi tingkat nasional atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran honorarium yang ditetapkan dalam peraturan terkait SHR dan SHS, contohnya : Najwa Shihab, Helmy Yahya, KH. Anwar Zahid atau lainnya
- (4) Penganggaran iuran jaminan/ asuransi dengan ketentuan:
- (a) Pemerintah daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan program jaminan Kesehatan dan menjaga kesehatan keuangan jaminan social kesehatan, pemerintah daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
 - (c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh

penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta jaminan kesehatan nasional yaitu pekerja penerima upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI);

- (d) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerah dengan skema ganda
- (5) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa kendaraan bermotor, dan sewa aset tidak berwujud;
- (6) Penganggaran jasa konsultasi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tidak mengalihkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada konsultan. Sedangkan penganggaran Jasa konsultasi konstruksi dalam rangka pelaksanaannya belanja modal mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai KDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Penganggaran pengembangan kompetensi SDM Aparatur meliputi beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis meliputi :
 - (a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan stat pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- c) Belanja Pemeliharaan
 - (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Belanja pemeliharaan aset tetap akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Memperpanjang masa manfaat; dan/atau

- (b) Memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
 - (c) Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap
- d) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menggabungkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standart harga satuan
- (1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri, meliputi:
- (a) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dengan komponen uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi;
 - (b) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk uang transport kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya
 - (c) Belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota, digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang meliputi:
 - i. Biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
 - ii. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
 - iii. uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota

- iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi
- (2) Belanja perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar negeri dengan memedomani ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - (3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - (4) Perjalanan dinas yang bersifat teknis dihadiri oleh pelaksana perjalanan dinas yang membidangi langsung;
 - (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, meliputi:
 - (a) Dalam rangka efisiensi pendanaan, untuk kegiatan yang sifatnya koordinasi ke instansi di luar daerah diupayakan memanfaatkan media komunikasi yang tersedia (telepon, teleconference, email dan lain-lain);
 - (b) Kegiatan yang sifatnya promosi, pameran atau sejenisnya ke luar daerah, dilakukan secara selektif dengan memperhatikan capaian output kegiatan dan dibatasi jumlah pegawai/masyarakat yang mengikuti dan tidak dialokasikan biaya perjalanan dinas pendahuluan untuk persiapan kegiatan;
 - (c) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas fungsi yang dilaksanakan berupa kunjungan kerja, studi tiru, studi komparasi, *benchmarking* atau sebutan lain berlaku ketentuan:
 - i. SKPD yang mengikuti atau menjadi peserta kegiatan adalah SKPD dan/atau unit SKPD yang terkait atau berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas;
 - ii. Pendamping dari SKPD pelaksana Perjalanan Dinas paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total ASN pada SKPD penyelenggara;
 - iii. Dalam hal disediakan sarana transportasi oleh SKPD pelaksana maka peserta tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas/umum, dikecualikan bagi panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan/atau penyelesaian administrasi/pertanggungjawaban;

- iv. Dalam kondisi tertentu, ASN pelaksana Perjalanan Dinas diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas/umum dengan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - v. Melaporkan hasil perjalanan dinas yang memuat *best practices* yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kinerja SKPD dan rencana aksi sebagai tindaklanjutnya kepada Sekretaris Daerah
- (d) Perjalanan Dinas yang dibiayai dana hibah pemerintah daerah berlaku ketentuan:
- i. Dilaksanakan oleh penerima hibah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
 - ii. Anggaran Perjalanan Dinas penyelenggara rapat dan/pertemuan di luar daerah dan kunjungan kerja maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total hibah yang diterima;
 - iii. Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk dalam rangka memberangkatkan kontingen olahraga mengikuti pertandingan dan pemberangkatan Jemaah Haji ke Bandara, dan
 - iv. Perjalanan Dinas Kunjungan kerja tidak boleh dilaksanakan setiap tahun;
- (e) Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, dan apabila biaya penginapan dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan maka menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut. Ketentuan ini berlaku juga untuk pendamping Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan kegiatan dan menginap di hotel/penginapan;
- (f) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (g) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (h) Uang harian dan uang representatif dibayarkan secara *lumpsum*;
- (6) Perjalanan dinas dalam negeri memedomani Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri;

- (7) Standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional yang merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran perjalanan dinas;
- e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud dan dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan:
 - (1) Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - (c) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (e) Uang yang diberikan kepada RT dan RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukan bagi Pemerintah Daerah;
 - (f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - (g) Belanja uang dan/atau jasa lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, memperhatikan asas kepatuhan, dijabarkan, rasionalitas dan efektivitas dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan
- c. Belanja Hibah
 - 1) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lain;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) Badan Usaha Milik Daerah;
 - (e) Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (f) Partai Politik
 - 3) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ Lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan
 - 4) Hibah kepada badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia hanya dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) Telah memiliki izin operasional atau tanda daftar dari instansi yang berwenang paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - (b) Telah melaksanakan kegiatan operasional secara nyata dan berkesinambungan yang dibuktikan dengan laporan aktivitas organisasi.
 - 5) Ketentuan pemberian hibah kepada partai politik
 - (a) Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - (b) Pemberian hibah keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;
 - (c) Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung

program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan di Sekretariat Daerah;

- 7) Dalam hal usulan hibah barang berupa pekerjaan konstruksi maka proposal usulan hibah wajib melampirkan profil calon penyedia jasa konstruksi yang paling sedikit melampirkan:
 - (a) Salinan sertifikat badan usaha (SBU) jasa konstruksi yang masih berlaku dan sesuai dengan klasifikasi pekerjaan; dan
 - (b) Salinan sertifikat kompetensi kerja (SKK) konstruksi bagi tenaga ahli atau pelaksana yang ditunjuk.
 - 8) Dalam rangka transparansi verifikasi usulan penerima hibah, usulan hibah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan proses verifikasi dan seleksi calon penerima hibah mengacu pada ketentuan yang berlaku dilakukan secara transparan, serta melibatkan unsur pengawas internal.
 - 9) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan, sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan hibah dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Belanja hibah memedomani Peraturan Walikota Blitar nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan evaluasi hibah;
 - 11) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan melaporkan hasil monitoring kepada Walikota Blitar dengan tembusan Inspektur Daerah Kota Blitar dan BPKAD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritas pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

- (a) Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko social;
 - (b) Lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko social;
- 3) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dengan selektif dan tidak terus menerus yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - 4) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
 - 6) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam;
 - 7) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
 - (c) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Belanja bantuan sosial memedomani Peraturan Walikota nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

- a. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan
- b. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah
 - 3) Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
 - 4) Kriteria lainnya, yaitu:
 - a) Berwujud
 - b) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) Dapat diidentifikasi
 - 2) Tidak mempunyai wujud fisik
 - 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual
 - 4) Dapat dikendalikan oleh entitas
 - 5) Memiliki manfaat ekonomi masa depan
- d. Diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan mempertimbangkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Penganggaran dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada, standar kebutuhan dan standar harga;
3. Belanja Tidak Terduga
- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berda diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai amanat perundang-undangan, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - 4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- b. Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek;
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan dengan memedomani Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan valuasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

F. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan daerah dapat bersumber dari :
 - a) Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - b) Pencairan dana cadangan

- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman daerah
 - e) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f) Penerimaan Piutang Daerah;
 - g) Penerimaan Dana Bergulir;
 - h) Penerimaan Hasil Penarikan; dan/atau
 - i) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
- a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan modal daerah
 - c) Pembayaran pembiayaan utang daerah
 - d) Pemberian pinjaman daerah;
 - e) Pemberian Dana Bergulir; dan/atau
 - f) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

G. DEFINISI OPERASIONAL AKUN BELANJA

Definisi operasional akun belanja sesuai dengan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 huruf I tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026.

H. HAL KHUSUS LAINNYA

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang Pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang Pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok (program/kegiatan/sub kegiatan yang langsung mendorong kinerja);
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk mendukung transformasi Kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang Kesehatan;
3. Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau

transfer ke daerah. Tahun 2027 merupakan tahun akhir pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan public sejak 5 (lima) tahun diterbitkannya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dilakukan sinergi pendanaan dengan ketentuan:
 - a. Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD;
 - b. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari PAD, TKD dan/atau pembiayaan utang daerah;
 - c. Pendanaan selain dari APBD berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan pemerintah dapat mensinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas perbantuan.
5. Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memedomani Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas masing-masing bidang/urusan SPM mempedomani peraturan terkait, yaitu:
 - a. Urusan Pendidikan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan beserta UPTD nya dan RSUD Mardi Waluyo;
 - c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - d. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM ini untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM ini untuk UPT Pemadam Kebakaran UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemenuhan belanja SPM bidang serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, maka alokasi belanja pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 1% dari total belanja daerah (untuk daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00) dan paling sedikit sebesar 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 (bagi daerah dengan total belanja daerah diatas Rp.2.000.000.000.000,00). Pengalokasian belanja pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas Pemerintah Daerah;
 7. Penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian alokasi untuk setiap kelurahan memperhatikan indikator antara lain jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah RT dan RW, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana local, prioritas khusus sesuai kebijakan program daerah;
 8. Penganggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
 9. Pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan;
 10. Pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran

yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

11. Dalam rangka pemenuhan belanja yang bersifat mengikat, diantaranya belanja pegawai, listrik, telepon, internet, maka dalam penyusunan RKA TA 2027 agar diperhitungkan secara cermat dengan memertimbangkan kebutuhan anggaran untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, dan memperhatikan kebutuhan anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran;
12. Belanja jasa kerja Tenaga Pendukung Jasa Lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formasi dan jumlah personil berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mempertimbangkan beban kerja pegawai sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya;
13. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dilaksanakan dengan selektif dan mengedepankan prinsip efektif dan efisien, dimana untuk pelaksanaan rapat yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) jam hanya disediakan kudapan atau snack rapat kecuali dalam hal waktu pelaksanaan tidak dapat diperkirakan.
14. Dalam rangka menjamin keselarasan substansi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan klasifikasi jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD agar memastikan ketepatan penganggaran sesuai karakteristik belanja, sehingga tidak terjadi kesalahan penganggaran seperti belanja modal yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau sebaliknya, Dalam penerapannya, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan barang atau pelaksanaan pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh aset tetap, namun nilai perolehannya tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.
 - 2) Belanja pemeliharaan yang mengakibatkan terbentuknya aset tetap baru, menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, kualitas, atau fungsi aset tetap, dianggarkan pada Belanja Modal, sepanjang memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - 3) Belanja pemeliharaan yang hanya bertujuan mempertahankan kondisi aset tetap agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, tidak menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, maupun fungsi aset, atau tidak memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap, dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.
15. Pendanaan Belanja Lainnya:
 - a. Kegiatan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan lebih selektif dan tidak melebihi target PAD yang ditetapkan. Dialokasikan untuk mendanai kegiatan operasional penunjang/ pemungutan

PAD dan diutamakan untuk pendanaan kegiatan yang bersifat khusus (BLUD dan kapitasi JKN) dialokasikan pada kegiatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Pelaksanaan program dan kegiatan dari dana khusus, antara lain:

- 1) Kegiatan dengan sumber pendanaan BLUD sesuai dengan RBA yang diusulkan oleh RSUD Mardi Waluyo
- 2) Kegiatan dengan sumber pendanaan Dana Bagu Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan ketentuan rencana alokasi hasil dari asistensi Propinsi dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 3) Kegiatan dengan sumber pendanaan dari DAK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait;
- 4) Belanja wajib bersumber dana hasil penerimaan atas Pajak Rokok, ditetapkan minimal sebesar 50% untuk mendanai:
 - a) Pelayanan kesehatan masyarakat meliputi penurunan factor resiko penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan, kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau penyediaan peralatan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - b) Penegakan hukum, meliputi pemberantasan peredaran rokok ilegal, penegakan aturan mengenai larangan rokok;
 - c) Jaminan Kesehatan nasional dianggarkan sebesar 75% dari alokasi dana pelayanan Kesehatan;
- 5) Belanja wajib bersumber dana hasil penerimaan atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- 6) Belanja wajib bersumber dana hasil penerimaan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum
- 7) Belanja wajib bersumber dana hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau keru sakan lingkungan hidup dalam

daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

16. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan system yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Blitar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
- b. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat;
- c. Pengelolaan wilayah/Kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum;

17. Pagu ALokasi Belanja SKPD

Pagu belanja ditetapkan menurut Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II. Sedangkan pembagian alokasi anggaran untuk setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada unit organisasi yang akan diusulkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Bagian pada Sekretariat Daerah, UPTD dan Kelurahan) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman pada seluruh dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan.

I. TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD

1. Penyusunan RKA-SKPD

- a. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Rencana Kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Rencana pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah dirinci sampai dengan sub rincian obyek;
- c. Perencanaan pengadaan adalah dokumen yang harus disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bahan masukan atau acuan dalam menyusun RKA.
- d. Dalam penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Analisis

Standar Belanja dan standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- e. Standar Harga Satuan Regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dimana standar harga satuan merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada SKPD. Dalam pelaksanaan anggaran besaran standar harga satuan dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
- f. Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan untuk menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan dan dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- g. ASB ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah tentang analisis standar belanja, dan penerapan ASB diatur dalam surat edaran Sekretaris Daerah;
- h. Mempedomani ketentuan Peraturan Walikota Blitar nomor 14 Tahun 2026 tentang Analisis Standar Belanja.
- i. Jenis ASB non fisik yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) jenis, yaitu:
 - a) ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Di Dalam Kantor dengan Narasumber Internal
 - b) ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Di Dalam Kantor dengan Narasumber Eksternal
 - c) ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat Di Luar Kantor
 - d) ASB 004 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai Di Dalam Kantor dengan Narasumber Internal
 - e) ASB 005 Sosialisasi Tatap Muka Pegawai Di Dalam Kantor dengan Narasumber Eksternal
 - f) ASB 006 Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - g) ASB 007 Musrenbang Tingkat Kelurahan
 - h) ASB 008 Seminar Ke Masyarakat Di Dalam Kantor
 - i) ASB 009 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Dalam Kantor
 - j) ASB 010 Pelatihan Masyarakat Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Luar Kantor
 - k) ASB 011 Pelatihan Masyarakat Dengan Praktik Lapangan Penuh Hari – Dalam Kantor
 - l) ASB 012 Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Dalam Kantor
 - m) ASB 013 Pelatihan Pegawai Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Luar Kantor
 - n) ASB 014 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- o) ASB 015 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- p) ASB 016 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- q) ASB 017 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- r) ASB 018 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- s) ASB 019 Administrasi Kajian/ Penelitian oleh Konsultan/ Pihak Ketiga
- t) ASB 020 Peringatan Hari-Hari Khusus Atau Hari Jadi
- u) ASB 021 Penyelenggaraan Pameran
- v) ASB 022 Penyelenggaraan Perlombaan dengan Mengundang Peserta Perangkat Daerah
- w) ASB 023 Penyelenggaraan Perlombaan dengan Mengundang Peserta Masyarakat
- x) ASB 024 Penyelenggaraan Seleksi Kategori Perorangan
- y) ASB 025 Penyelenggaraan Perlombaan dengan Mendatangi Peserta
- z) ASB 026 Penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan
- aa) ASB 027 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Tingkat Kota
- bb) ASB 028 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik
- cc) ASB 029 Pelatihan Masyarakat Tingkat Kelurahan dengan Praktik Lapangan Penuh Hari – Dalam Kantor
- dd) ASB 030 Pelatihan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Dalam Kantor
- ee) ASB 031 Pelatihan Masyarakat Tingkat Kelurahan Tanpa Praktik Lapangan Penuh Hari – Luar Kantor
- ff) ASB 032 Pelatihan Masyarakat Tingkat Kelurahan dengan Praktik Lapangan Penuh Hari – Luar Kantor
- gg) ASB 033 Penyelenggaraan Desk/Rekonsiliasi/Verifikasi dan Asistensi
- hh) ASB 034 Monitoring dan Evaluasi Lapangan
- ii) ASB 035 Monitoring dan Evaluasi Meja
- jj) ASB 036 Pendampingan ASN
- kk) ASB 037 Pendampingan Masyarakat
- ll) ASB 038 Bimbingan Teknis
- j. Kalkulator ASB non fisik dapat diakses pada link https://bit.ly/ASB_2026 atau dengan mengakses website <https://asb.blitarkota.go.id/>

- k. ASB fisik terdiri dari 305 (tiga ratus lima) jenis. Penerapan ASB fisik dilakukan dengan cara input rencana belanja sebagaimana menu ASB fisik yang tersedia di SIPD-RI
- 2. Perekaman RKA-SKPD
 - a. Penyusunan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 14 - 19 Agustus 2026 secara elektronik melalui aplikasi SIPD-RI dengan laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Untuk kegiatan BOS SD/SMP terlebih dahulu direkam oleh setiap Satuan Pendidikan Negeri melalui aplikasi ARKAS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Kewenangan perekaman (input) RKA-SKPD diberikan kepada ASN pada unit pengelola keuangan masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah
- 3. Pendampingan/Verifikasi RKA-SKPD
 - a. Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan oleh Tim Teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD tahun 2026 sesuai jadwal yang ditentukan;
 - b. Tim teknis Verifikasi RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD TA 2026 membantu pelaksanaan tugas TAPD untuk melakukan verifikasi kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, dokumen perencanaannya lainnya, capaian kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi perkiraan maju untuk anggaran berikutnya dan program dan kegiatan antar RKA-SKPD
 - c. Pendampingan pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan pada tanggal 20, 21 dan 24 Agustus 2026.
 - d. Bagi SKPD yang memiliki sub unit (UPTD/Kelurahan/Bagian) terlebih dahulu melakukan verifikasi internal perangkat daerah dan sudah selesai selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2026;
 - e. Revisi/pembenahan RKA-SKPD dilakukan setelah pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD pada tanggal 20-28 Agustus 2026;
 - f. Untuk proses verifikasi RKA-SKPD, SKPD melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) TA 2027;
 - 2) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Pengadaan dan Pemeliharaan) Tahun 2027;
 - 3) Rencana Anggaran Belanja (RAB)/DED Pengadaan Kontruksi;
 - 4) Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi SKPD pengelola;
 - 5) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang menangani SPM;
 - 6) Dokumen PPRG (GAP, GBS dan KAK);

J. BATAS WAKTU DAN MEKANISME PENYAMPAIAN RKA-SKPD

1. Penyampaian dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD memedomani Standar Operasional Prosedur Verifikasi dan Pendokumentasian RKA-SKPD dan Rancangan DPA-SKPD yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/SOP_verifikasidanpendokumentasian_RKAdanRDPA
2. Batas waktu Penyampaian RKA-SKPD ke TAPD melalui BPKAD untuk di verifikasi selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2026 dengan ketentuan:
 - a. Dokumen RKA-SKPD meliputi:
 - 1) RKA-SKPD
 - 2) RKA-Pendapatan (bagi SPKD pengelola pendapatan)
 - 3) Sub kegiatan belanja
 - 4) RKA-Pembiayaan (PPKD)Dokumen dapat diunduh pada SIPD-RI penganggaran
 - b. SKPD mengunggah dokumen RKA-SKPD dan dokumen pendukung/kelengkapan verifikasi pada website "KAWENTAR" dengan tautan <https://sites.google.com/view/kawentar> pada site "BERANDA" menu "UPLOAD DOKUMEN" dan pilih nama Unit/Sub unit Perangkat Daerah.
3. Revisi/pembenahan RKA-SKPD pada SIPD-RI sebagai tindak lanjut hasil verifikasi RKA-SKPD paling lambat tanggal 28 Agustus 2026
4. Hasil revisi/pembenahan RKA-SKPD sebagaimana point 3, akan diteliti kembali oleh Tim Teknis Verifikasi paling lambat tanggal 28 Agustus 2026
5. Setelah dinyatakan sudah sesuai oleh Tim Teknis Verifikasi, perangkat daerah melakukan otorisasi dokumen RKA-SKPD untuk proses pendokumentasian RKA-SKPD dan disampaikan ke Bidang Anggaran BPKAD paling lambat tanggal 1 September 2026. Otorisasi dilakukan oleh Kepala perangkat daerah/PA masing-masing SKPD dengan ketentuan qrcode (telah tersedia di website KAWENTAR) telah terpasang beserta tanggal pengesahan RKA-SKPD tanggal 7 September 2026.
6. Dokumen RKA-SKPD yang telah mendapat persetujuan tim teknis verifikasi diunggah Kembali ke website KAWENTAR untuk pendokumentasian RKA-SKPD.

Ditetapkan di Blitar

Tanggal 12 Agustus 2026

WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	185.106.094.950,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	177.127.042.027,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42.520.547.143,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.900.930.322,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.023.200,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	312.232.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	426.142.400,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.175.800,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.894.850.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38.903.234,00	
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.846.500,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.323.400,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.586.000,00	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.732.100,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000,00	
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	259.520.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.255.910.000,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	632.381.788,00	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.649.500,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	322.470.900,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	702.833.500,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.786.350.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.831.309.934,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	550.800.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	311.806.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12.059.100,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9.545.150.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37.307.034,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17.415.500,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	64.355.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.250.000,00	
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.410.200,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.275.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.723.900,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.118.200,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.226.640.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.666.414.634,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	102.550.000,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	92.539.700,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.969.900.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	10.004.200,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	18.413.300,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.298.500.000,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	53.123.734,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.300.000,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	125.901.000,00	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	24.000.000,00	
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.925.800,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	241.909.000,00	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	302.248.600,00	
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35.700.000,00	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.065.500,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	739.300.000,00	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	96.549.100,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	36.771.000,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	148.408.000,00	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	323.305.700,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.121.892.253,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	83.500.000,00	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.903.734,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22.500.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.092.200.000,00	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.489.800,00	
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	17.088.800,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42.568.500,00	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.642.000,00	
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	24.160.000,00	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	158.877.000,00	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	25.190.700,00	
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.048.500,00	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.625.000,00	
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	10.006.600,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.257.600.000,00	
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	175.491.619,00	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	50.000.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	643.512.179,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	577.792.279,00	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	16.157.500,00	
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	25.026.300,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	194.632.500,00	
1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	8.100.000,00	
1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	212.187.000,00	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	121.688.979,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65.719.900,00	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.065.000,00	
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	8.342.100,00	
1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.055.800,00	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.357.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.370.581.034,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.370.581.034,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.205.344.134,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	165.236.900,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	12.964.500,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12.964.500,00	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.900.000,00	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7.064.500,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.579.437.171,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.721.500,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.197.900,00	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.516.200,00	
1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.992.400,00	
1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	60.495.000,00	
1.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	9.520.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.646.800.400,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.932.094.066,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.575.000,00	
1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	107.688.131.334,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.425.000,00	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.425.000,00	
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.770.000,00	
1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.770.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.316.450,00	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38.920.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	124.396.450,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.868.800,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.810.800,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.910.800,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.097.900,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.285.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.887.800,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.004.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.012.500,00	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.860.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.671.300,00	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.385.500,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.285.800,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.928.855.136,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.814.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	779.998.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.043.136,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.008.585,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.014.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.540.400,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.339.100,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.115.085,00	
1.01.0.00.0.00.01.0001	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	802.367.600,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	591.826.100,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	591.826.100,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	135.540.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	19.729.400,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	17.387.400,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	67.819.200,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	181.742.400,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	169.607.700,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.541.500,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.287.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.287.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.522.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.630.500,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.538.500,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.714.400,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.204.600,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.634.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.567.200,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.567.200,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.797.600,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.777.600,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.367.700,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.732.800,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.440.200,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.700,00	
1.01.0.00.0.00.01.0002	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	814.246.661,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	439.367.700,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	439.367.700,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	5.393.900,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.383.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	61.603.200,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	182.694.400,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	170.293.200,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	374.878.961,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.950.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.950.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.986.800,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.052.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.892.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.036.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.600.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.652.800,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.637.600,00	
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.678.600,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.959.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.730.161,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.710.161,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.574.400,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.385.400,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.143.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.046.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0003	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	931.457.575,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	595.596.475,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	595.596.475,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.000.000,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	94.620.475,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60.995.200,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	183.456.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	170.841.600,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	5.683.200,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	335.861.100,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.103.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.103.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.367.500,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.213.100,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.914.200,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.939.500,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.375.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.499.700,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.426.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.078.500,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.078.500,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.434.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.530.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.904.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.878.100,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.331.700,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.546.400,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0004	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	937.314.460,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	647.927.740,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	647.927.740,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.010.504,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	48.103.200,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15.771.300,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	61.782.336,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	183.456.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	170.841.600,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	67.962.800,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	289.386.720,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.613.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.613.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.967.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.280.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.919.200,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.814.500,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.476.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.978.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.094.000,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.094.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.454.320,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.434.320,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.257.700,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.587.200,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.670.500,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0005	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	857.753.070,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	493.108.800,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	493.108.800,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	116.000.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	5.553.900,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.425.600,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	27.194.900,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.889.600,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	148.780.800,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	137.264.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.644.270,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.815.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.815.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.578.900,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.980.100,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.376.200,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.094.100,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.946.500,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.382.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.098.600,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.098.600,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.514.400,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.494.400,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.637.370,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.807.400,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.816.800,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.013.170,00	
1.01.0.00.0.00.01.0006	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	927.059.900,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	538.032.100,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	538.032.100,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	58.449.400,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.100.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.936.400,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	162.691.200,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	151.585.000,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	101.270.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	389.027.800,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.950.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.950.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.335.600,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.980.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.859.600,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.867.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.935.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.694.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.276.800,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.276.800,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.224.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	612.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.612.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.241.400,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.995.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.246.400,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000,00	
1.01.0.00.0.00.01.0007	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	910.227.557,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	635.054.400,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	635.054.400,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	27.851.300,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	52.000.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	47.424.800,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	86.944.700,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	36.120.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	59.302.400,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	169.164.800,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	156.246.400,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.173.157,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.613.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.613.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.504.100,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.818.800,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.367.800,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.975.500,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.484.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.858.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.146.800,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.146.800,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.434.400,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	632.400,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.802.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.474.857,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.741.500,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.062.700,00	
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.670.657,00	
1.01.0.00.0.00.01.0008	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	886.631.600,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	627.903.100,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	627.903.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	130.500.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	40.837.500,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.250.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	61.384.400,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	163.072.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	151.859.200,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.728.500,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.950.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.950.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.818.800,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.894.800,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.926.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.191.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.800.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.455.000,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.552.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.957.300,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.957.300,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.703.800,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.111.800,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.592.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.298.600,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.524.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.774.600,00	
1.01.0.00.0.00.01.0009	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	911.994.500,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	659.672.500,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	659.672.500,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	117.681.800,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	40.608.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	56.541.900,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	27.500.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	63.043.200,00	
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	183.456.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	170.841.600,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.322.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.613.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.613.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.924.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.866.700,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.873.700,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.635.800,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.909.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.676.800,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.962.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.451.400,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.451.400,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.586.400,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.566.400,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.747.200,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.973.200,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.678.000,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.096.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	241.308.507.225,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	127.878.449.225,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.479.882.200,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.443.588.355,00	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.200.000.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	367.888.645,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	545.500.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.018.693.600,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	11.506.110,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.900.661.065,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.286.900,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.104.200,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	322.688.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.020.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.661.850.050,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.020.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.546.481.600,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	590.610.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	226.931.000,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	17.949.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.520.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.095.863.328,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	111.520.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	9.500.000.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	174.678.627,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	31.875.000,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	102.657.220,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	30.000.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	16.607.940,00	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	11.520.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.915.800,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	82.567.800,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	11.520.000,00	
1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	63.324.600,00	
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	11.520.000,00	
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	69.255.000,00	
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	69.255.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	108.303.400,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	108.303.400,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.329.380,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	14.484.500,00	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12.844.880,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	730.064.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	11.399.200,00	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	11.399.200,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	377.386.000,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	365.386.000,00	
1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	12.000.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.279.000,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.279.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	536.543.800,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	95.501.800,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	95.501.800,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	133.153.000,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	133.153.000,00	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.520.000,00	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.520.000,00	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.040.000,00	
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5.040.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	295.329.000,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	295.329.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.987.350.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.973.550.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.973.550.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.800.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.800.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.144.609.025,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.540.000,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.963.000,00	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.400.000,00	
1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.336.200,00	
1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.750.000,00	
1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	890.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.200.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.868.855.325,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.868.405.325,00	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	450.000,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	450.000,00	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	450.000,00	
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	450.000,00	
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	450.000,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.450.000,00	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	450.000,00	
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.317.100,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.384.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.863.000,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	612.500,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	900.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.657.600,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.000,00	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	450.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.200.000,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.200.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.619.738.900,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	428.574.000,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.191.164.900,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.607.700,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.615.200,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.025.500,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.167.000,00	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.800.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1.015.068.800,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.015.068.800,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	323.044.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.759.100,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.704.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	274.580.900,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	692.024.800,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	692.024.800,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	996.296.800,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	329.105.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.918.480,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33.660.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	274.526.520,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	667.191.800,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	667.191.800,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1.118.692.400,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	347.851.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.631.100,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25.200.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	299.019.900,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	770.841.400,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	770.841.400,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	110.300.000.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	300.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.000.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.000.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	39.615.080.850,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.615.080.850,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.673.228.571,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.673.228.571,00	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	302.400.001,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.846.834.209,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.418.994.361,00	
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	100.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	307.989.760,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	307.989.760,00	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30.038.700,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	85.024.000,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	192.927.060,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	535.096.400,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	535.096.400,00	
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	110.211.600,00	
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	73.768.000,00	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	179.300.000,00	
1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	140.316.800,00	
1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	10.500.000,00	
1.03.05.2.01.0050	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	10.500.000,00	
1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	10.500.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.138.186.875,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.138.186.875,00	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3.475.934.475,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.374.002.400,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	108.250.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	180.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.038.483.600,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.038.483.600,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	35.233.200,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	163.880.000,00	
1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.700.370.400,00	
1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	139.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.086.359.683,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14.086.359.683,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	428.550.000,00	
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.050.000.000,00	
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	2.197.342,00	
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	5.274.129.848,00	
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	7.064.941.826,85	
1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	10.000.000,00	
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	44.790.666,15	
1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.750.000,00	
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	10.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	400.668.550,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.168.550,00	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	133.654.100,00	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	66.514.450,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200.500.000,00	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	25.500.000,00	
1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	175.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.338.267.400,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	428.857.400,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	129.900.000,00	
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	69.900.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	29.057.400,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.150.000,00	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	50.000.000,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	150.000,00	
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	249.110.000,00	
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	99.110.000,00	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	75.000.000,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.150.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	62.400.000,00	
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	9.350.000,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	93.600.000,00	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	82.400.000,00	
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	75.000.000,00	
1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	18.700.000,00	
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	18.700.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.096.800.011,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.212.500,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.137.500,00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.700.000,00	
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	950.000,00	
1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	
1.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	825.000,00	
1.03.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	500.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.665.758.011,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.664.558.011,00	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000,00	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000,00	
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	500.000,00	
1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	500.000,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.155.500,00	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.155.500,00	
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.390.500,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.143.000,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.108.300,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.647.900,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.813.800,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.022.500,00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.901.000,00	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.898.500,00	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.698.500,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.516.800,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.000.000,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.516.800,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.868.200,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.850.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.600.000,00	
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	137.200,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.031.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.360.180.150,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.360.180.150,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	659.143.799,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	109.750.000,00	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	107.000.000,00	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.375.000,00	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.375.000,00	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.059.000,00	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	11.685.000,00	
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	4.374.000,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.510.000,00	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	32.580.000,00	
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.640.000,00	
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	4.640.000,00	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.650.000,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	479.824.799,00	
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	28.538.500,00	
1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	451.286.299,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	988.326.735,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100.000.000,00	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	100.000.000,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	888.326.735,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	245.000.000,00	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	22.500.000,00	
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	17.885.250,00	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	497.941.485,00	
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	105.000.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.204.175.965,60	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.204.175.965,60	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.084.275.965,60	
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	105.000.000,00	
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	14.900.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.021.352.867,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.021.352.867,00	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8.800.000,00	
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	435.552.867,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	577.000.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.487.180.783,40	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.280.800,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	
1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.280.800,00	
1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.000.000,00	
1.04.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.000.000,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.176.260.048,40	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.174.000.048,40	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.260.000,00	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.628.800,00	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.628.800,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.230.420,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.869.920,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.432.500,00	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.460.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.839.500,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.030.500,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.150.000,00	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.448.000,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.159.400,00	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.622.800,00	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.536.600,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.230.160,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.510.000,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.720.160,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.391.155,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.537.960,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.329.195,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.540.000,00	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.984.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.862.952.850,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.202.164.300,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.461.405.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.335.900.900,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6.577.600,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94.950.100,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	234.339.650,01	
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	9.824.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.692.780.700,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	7.272.600,00	
1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	70.845.899,99	
1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	119.260.350,00	
1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	50.050.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	121.480.900,00	
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	504.100,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	72.067.592,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	35.445.408,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.463.800,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4.023.200,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	4.023.200,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	200.000.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.040.800,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.318.900,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	6.424.100,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	788.500,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	28.800.000,00	
1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	100.000.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	30.709.300,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	14.544.400,00	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5.779.100,00	
1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8.765.300,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	12.414.800,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	4.450.000,00	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	7.964.800,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.540.759.300,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.255.800,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000,00	
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	600.000,00	
1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.955.800,00	
1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.200.000,00	
1.05.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	500.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.563.535.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.562.535.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.255.800,00	
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	9.255.800,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.568.300,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.492.300,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.702.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.620.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.964.600,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.964.600,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.676.036,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.901.100,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.774.936,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.503.764,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.927.400,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.795.000,00	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.781.364,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.660.788.550,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	424.855.850,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	115.575.550,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	65.575.550,00	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	149.514.300,00	
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	9.874.100,00	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	9.336.400,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	22.753.100,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	3.076.700,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.950.000,00	
1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	99.524.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	34.308.200,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4.779.500,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.880.000,00	
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	2.115.800,00	
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	16.789.500,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.743.400,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.457.800,00	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	9.777.400,00	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	2.630.400,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan	2.200.000,00	
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	59.151.000,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.699.000,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.235.932.700,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.890.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.000,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000,00	
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	220.000,00	
1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	
1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	975.000,00	
1.05.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	495.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.227.738.350,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.227.490.350,00	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	248.000,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	225.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.869.350,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.396.000,00	
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81.473.350,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.640.500,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.422.400,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.601.500,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.701.500,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.386.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.948.100,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.521.000,00	
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	306.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.842.200,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.330.800,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.511.400,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.750.550,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.540.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.210.550,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.976.750,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.707.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.751.300,00	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.947.200,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.347.400,00	
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.223.850,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	12.048.666.400,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	12.048.666.400,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	477.149.900,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	477.149.900,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	228.780.250,00	
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	3.312.000,00	
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	55.842.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	184.059.800,00	
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	5.155.800,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	662.185.700,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	647.457.700,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	274.871.300,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	24.879.200,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	15.198.000,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	124.874.800,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26.131.600,00	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	28.560.000,00	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.430.000,00	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.800.000,00	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.800.000,00	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	28.440.000,00	
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1.800.000,00	
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	64.840.300,00	
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	30.832.500,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	14.728.000,00	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.200.000,00	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	3.040.000,00	
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10.488.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.861.056.322,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.861.056.322,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	115.639.000,00	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.705.476.322,00	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.791.000,00	
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	150.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.205.500,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	35.907.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	20.154.000,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	6.120.000,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.633.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	143.298.500,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	115.097.100,00	
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	4.923.800,00	
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	9.763.800,00	
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	13.513.800,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	31.194.400,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.194.400,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.194.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.837.874.578,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.650.000,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	
1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	
1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.750.000,00	
1.06.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	250.000,00	
1.06.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	400.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.967.896.575,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.967.646.575,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000,00	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.000,00	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.958.025,00	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.504.000,00	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	93.454.025,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.038.741,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.605.100,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.345.200,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.567.348,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.214.700,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.248.100,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.500,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.766.293,00	
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.131.500,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.500.000,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.500.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.931.184,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.466.280,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.464.904,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.650.053,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.938.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.630.353,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.081.700,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.147.537.500,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	2.147.537.500,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.018.000.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.018.000.000,00	
2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.018.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	77.277.500,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	71.277.400,00	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	9.151.800,00	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	3.650.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	58.475.600,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	6.000.100,00	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.500.000,00	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	4.500.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	52.260.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000,00	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.300.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	49.960.000,00	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.450.000,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000,00	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.410.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.563.069.500,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.563.069.500,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	302.681.664,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	19.280.914,00	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	10.180.800,00	
2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	9.100.114,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.508.400,00	
2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	39.026.400,00	
2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	81.482.000,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	162.892.350,00	
2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	27.148.800,00	
2.08.02.2.03.0015	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	135.743.550,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	237.081.295,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72.953.100,00	
2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	14.478.600,00	
2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	17.160.000,00	
2.08.03.2.01.0012	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	41.314.500,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.203.495,00	
2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	25.000.000,00	
2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.924.700,00	
2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	6.300.000,00	
2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	14.587.500,00	
2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	11.037.200,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22.367.400,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.367.400,00	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	22.367.400,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	30.629.570,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.629.570,00	
2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas	30.629.570,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	46.697.400,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	21.530.800,00	
2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	21.530.800,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.166.600,00	
2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	25.166.600,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	245.285.335,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	27.781.800,00	
2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	5.500.000,00	
2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	22.281.800,00	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.775.210,00	
2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	24.886.500,00	
2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	15.314.785,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.728.325,00	
2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	28.086.100,00	
2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	72.642.225,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.678.326.836,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.611.600,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.900.000,00	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.055.800,00	
2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	7.000.000,00	
2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.655.800,00	
2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3.300.000,00	
2.08.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	700.000,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.952.562.000,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.951.302.000,00	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.260.000,00	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.785.000,00	
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.785.000,00	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.315.900,00	
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54.315.900,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.931.086,00	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.455.700,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.500,00	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.114.400,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.925.000,00	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.508.205,00	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.415.281,00	
2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.512.000,00	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.747.600,00	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.747.600,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.157.250,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.226.000,00	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.931.250,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.216.400,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.484.400,00	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.353.400,00	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.178.600,00	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.200.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	203.902.000,00	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	203.902.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	137.157.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	24.817.500,00	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	5.492.800,00	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	15.999.700,00	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	2.125.000,00	
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1.200.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	32.208.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.208.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	80.131.700,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	14.132.000,00	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	50.000.000,00	
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15.999.700,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	60.500.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.500.000,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.250.000,00	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	3.250.000,00	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.244.800,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	6.244.800,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	6.244.800,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	354.165.000,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	354.165.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	26.400.000,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.400.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.200.000,00	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.200.000,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10.725.000,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.725.000,00	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000,00	
2.10.05.2.01.0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.125.000,00	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	22.000.000,00	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	22.000.000,00	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	8.800.000,00	
2.10.08.2.02.0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	13.200.000,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	295.040.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	295.040.000,00	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	88.750.000,00	
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	206.290.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.802.895.750,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	25.802.895.750,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	246.000.800,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	246.000.800,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5.000.000,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	54.450.000,00	
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.000.000,00	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	174.800.000,00	
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	5.000.800,00	
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	4.750.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.620.115.400,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.620.115.400,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.620.115.400,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	490.000,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	490.000,00	
2.11.05.2.02.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	490.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.000.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	500.000,00	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	500.000,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.039.800,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.039.800,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	25.000.000,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	20.039.800,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.350.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.350.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.350.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	500.000,00	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	500.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.773.541.834,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	17.773.541.834,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	212.577.986,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9.364.545.950,00	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	864.807.200,00	
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	7.331.610.698,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.822.857.916,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000,00	
2.11.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	100.000,00	
2.11.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	500.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.194.300.000,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.193.800.000,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000,00	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000,00	
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.000,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.708.900,00	
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42.708.900,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.592.916,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.700,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.414.100,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.989.000,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.100.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.641.200,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.449.916,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.985.500,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.032.500,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.953.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.670.600,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.497.300,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.173.300,00	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.112.635.650,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.112.635.650,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	307.628.503,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	267.418.503,00	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	267.418.503,00	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	13.200.000,00	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	13.200.000,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	25.010.000,00	
2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.375.000,00	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	23.635.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.000.000,00	
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	2.000.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	67.653.300,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	23.622.700,00	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17.672.700,00	
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	5.950.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39.085.600,00	
2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4.200.000,00	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	34.885.600,00	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	4.945.000,00	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4.945.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	109.118.200,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1.772.800,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.772.800,00	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.558.000,00	
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.558.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	53.881.600,00	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5.855.800,00	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.025.800,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.905.800,00	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.600.000,00	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5.305.800,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.336.648,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	15.336.648,00	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	15.336.648,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.612.898.999,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.727.800,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	231.200,00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.496.600,00	
2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	
2.12.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	500.000,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.240.200.000,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.240.200.000,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.783.800,00	
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63.783.800,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.213.388,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.271.400,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.300.000,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.500.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.020.988,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.021.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85.000.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.046.400,00	
2.12.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.046.400,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.203.950,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.047.200,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505.156.750,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.723.661,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.490.600,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.649.200,00	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.000.000,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.503.861,00	
2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.080.000,00	
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	576.999.532,00	
4.01.2.13.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	576.999.532,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.386.500,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.386.500,00	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.386.500,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	526.613.032,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	526.613.032,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	468.022.532,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.625.000,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	48.965.500,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.295.906.000,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.295.906.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	66.058.800,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7.858.800,00	
2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	7.858.800,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	58.200.000,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	16.800.000,00	
2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	41.400.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	399.894.966,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	45.000.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	45.000.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	149.475.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	149.475.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	205.419.966,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	184.756.000,00	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	12.000.000,00	
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	6.510.000,00	
2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2.153.966,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	829.952.234,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	64.952.234,00	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	53.477.234,00	
2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	3.600.000,00	
2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	7.875.000,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	765.000.000,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	345.000.000,00	
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	6.000.000,00	
2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	414.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.945.153.350,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	17.945.153.350,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.250.308.666,55	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.779.097.908,03	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	47.826.432,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.708.400,00	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4.358.506.900,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	356.056.176,03	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	208.764.770,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	208.764.770,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.230.880.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.230.880.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	180.073.395,00	
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	97.961.060,00	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71.912.335,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	649.981.374,04	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	423.990.074,00	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	99.650.000,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29.400.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manaiemen dan Rekayasa Lalu Lintas	15.000.000,04	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	81.941.300,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.201.511.219,48	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.829.222.019,48	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	372.289.200,00	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.223.376.000,00	
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.223.376.000,00	
2.15.05.2.01.0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	1.223.376.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.471.468.683,45	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.175.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.750.000,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	
2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.375.000,00	
2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	
2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.050.000,00	
2.15.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.750.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.108.516.932,81	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.106.526.932,81	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.990.000,00	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.000.000,00	
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.000.000,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.907.700,00	
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.907.700,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.511.000,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.300.000,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.989.900,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.847.600,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.939.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.494.500,00	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.956.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000,00	
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.984.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.078.700,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.724.500,00	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.354.200,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.402.050,64	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.968.800,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.433.250,64	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.877.300,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.381.500,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.986.200,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.666.600,00	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.843.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.295.696.950,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	16.295.696.950,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.539.401.650,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.539.401.650,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	760.737.000,00	
2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	55.607.100,00	
2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.417.238.900,00	
2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	54.946.000,00	
2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	574.912.000,00	
2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	33.867.000,00	
2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	542.623.650,00	
2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten	99.470.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.580.653.165,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	233.576.000,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	233.576.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.347.077.165,00	
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	32.625.000,00	
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	12.550.000,00	
2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	3.087.360.000,00	
2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	220.575.000,00	
2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	377.585.000,00	
2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.614.241.365,00	
2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	2.140.800,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.175.642.135,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000,00	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000,00	
2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.100.000,00	
2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000,00	
2.16.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.100.000,00	
2.16.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.100.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.930.750.000,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.930.350.000,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	400.000,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.584.550,00	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.584.550,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.476.500,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.832.500,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.030.000,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.956.600,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.769.600,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.977.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.710.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.200.000,00	
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.972.100,00	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.497.600,00	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.474.500,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.992.500,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.992.500,00	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.866.485,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.467.800,00	
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.600.000,00	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.798.685,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.526.449.950,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	5.526.449.950,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	19.855.800,00	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.855.800,00	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.855.800,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	46.755.800,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	46.755.800,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	46.755.800,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.082.800,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.082.800,00	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	28.082.800,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	28.082.800,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.082.800,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	28.082.800,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	246.143.910,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.143.910,00	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	5.000.000,00	
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	12.849.360,00	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	178.294.550,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	867.449.862,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	867.449.862,00	
2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	599.999.892,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	130.000.000,00	
2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	74.449.970,00	
2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM	10.000.000,00	
2.17.07.2.01.0023	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	33.000.000,00	
2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	10.000.000,00	
2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	10.000.000,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	246.631.100,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	246.631.100,00	
2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	246.631.100,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.043.447.878,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.515.700,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.859.800,00	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.359.800,00	
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.464.400,00	
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.491.700,00	
2.17.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3.340.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.278.208.918,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.275.900.418,00	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.308.500,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.925.500,00	
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.925.500,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.621.700,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.206.100,00	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.746.000,00	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.415.500,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.712.000,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.730.100,00	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.508.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.304.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.517.600,00	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.517.600,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.844.460,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.209.960,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.634.500,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.814.000,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.963.400,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.480.600,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.370.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.894.265.050,00	
2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.894.265.050,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	129.962.200,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	54.962.200,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	29.958.600,00	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	15.003.600,00	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	10.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	510.043.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	510.043.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	10.043.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	160.530.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	160.530.000,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.950.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	77.491.400,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	25.082.600,00	
2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	53.006.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	49.995.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.995.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	10.000.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	19.995.000,00	
2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20.000.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.200.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.200.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.041.534.850,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.993.800,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.992.800,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.001.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.895.170.000,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.895.170.000,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.719.000,00	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.890.000,00	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48.829.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.235.100,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.980.300,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.501.400,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.494.800,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.750.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.600,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.508.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724.836.010,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	564.836.010,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.580.940,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.320.768,00	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.064.000,00	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.696.172,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	22.267.374.450,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.267.374.450,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.730.472.800,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.671.875.000,00	
2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	8.442.800,00	
2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	9.264.800,00	
2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota	115.686.200,00	
2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	3.538.481.200,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.597.800,00	
2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	58.597.800,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.517.876.400,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.247.521.700,00	
2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	10.247.521.700,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.343.100,00	
2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	46.000.000,00	
2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota	152.343.100,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	246.881.500,00	
2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	15.000.000,00	
2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	10.824.000,00	
2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	10.000.000,00	
2.19.03.2.03.0014	Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	86.933.000,00	
2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	124.124.500,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.645.130.100,00	
2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	2.645.130.100,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	180.000.000,00	
2.19.03.2.05.0013	Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	180.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	328.440.800,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	328.440.800,00	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	
2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	28.440.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.690.584.450,00	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.625.400,00	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	996.200,00	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.887.200,00	
2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	620.000,00	
2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.853.800,00	
2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.020.200,00	
2.19.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	248.000,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.233.992.500,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.232.430.000,00	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.562.500,00	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	522.800,00	
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	522.800,00	
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	522.800,00	
2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	522.800,00	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.002.300,00	
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.002.300,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.823.200,00	
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.001.000,00	
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.001.200,00	
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.949.900,00	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.016.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.093.600,00	
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.534.000,00	
2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.975.500,00	
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	498.000,00	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.830.850,00	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.830.850,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.226.900,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.763.400,00	
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.806.463.500,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.037.700,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.152.600,00	
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.885.100,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	324.698.700,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	324.698.700,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	324.698.700,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	324.698.700,00	
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	30.000.000,00	
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	8.000.000,00	
2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	113.000.000,00	
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	45.000.000,00	
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	58.698.700,00	
2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	70.000.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	340.019.600,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	340.019.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	340.019.600,00	
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	170.619.600,00	
2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	4.400.000,00	
2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	165.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.528.473.480,00	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.528.473.480,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.286.890.280,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	571.519.600,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan	147.023.200,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	404.510.400,00	
2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	19.986.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	715.370.680,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	715.370.680,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	241.583.200,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	89.900.000,00	
2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	89.900.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	151.683.200,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	66.510.600,00	
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	85.172.600,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.332.694.650,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.332.694.650,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	727.852.650,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	453.728.270,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	17.112.100,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.658.550,00	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	8.250.000,00	
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	153.537.020,00	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.799.400,00	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	36.841.500,00	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	108.610.600,00	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	90.919.100,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.124.380,00	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.656.600,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	6.247.200,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	25.861.900,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	227.358.680,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	23.045.300,00	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	23.045.300,00	
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	23.045.300,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.581.796.700,00	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.176.800,00	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.270.200,00	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	693.600,00	
2.23.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.575.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
2.23.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.078.000,00	
2.23.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	560.000,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.432.911.000,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.432.811.000,00	
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.000,00	
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000,00	
2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000,00	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.736.100,00	
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.700,00	
2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.692.400,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.028.480,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.900,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.346.300,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.838.500,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.870.500,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.180,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.158.100,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.069.833,00	
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	88.281,00	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.906.770,00	
2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.782,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	738.542.318,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.414.042,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.128.276,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.232.169,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.345.664,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.617.305,00	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	137.200,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.847.000,00	
2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.285.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	95.926.100,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	95.926.100,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	91.801.100,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	86.301.100,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.500.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	4.125.000,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	4.125.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.414.032.500,00	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.414.032.500,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	311.932.500,00	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.150.000,00	
3.25.04.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.150.000,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	200.000.000,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	102.782.500,00	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.100.000,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.032.500,00	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	28.650.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.102.100.000,00	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	19.792.300,00	
3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.712.300,00	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	9.080.000,00	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	19.503.500,00	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	19.503.500,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.062.804.200,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.062.804.200,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.624.711.120,00	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.624.711.120,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.000.850.850,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	940.476.850,00	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	490.759.900,00	
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	449.716.950,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.825.000,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.825.000,00	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	48.549.000,00	
3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	48.549.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	953.503.620,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	953.503.620,00	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	164.706.820,00	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	725.951.800,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	62.845.000,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	47.865.200,00	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	15.000.000,00	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	32.865.200,00	
3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	22.858.600,00	
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	10.006.600,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	104.507.400,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	104.507.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	104.507.400,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.517.984.050,00	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.509.300,00	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.948.500,00	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.702.800,00	
3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.750.000,00	
3.26.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.010.000,00	
3.26.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.098.000,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.437.423.288,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.436.144.588,00	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.278.700,00	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.598.100,00	
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	82.598.100,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.019.528,00	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.282.400,00	
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.226.400,00	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.248.900,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.012.000,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.622.500,00	
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.508.000,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.611.328,00	
3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.508.000,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.000.000,00	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.000.000,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.357.243.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.936.000,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.023.307.000,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.190.834,00	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.857.200,00	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.168.600,00	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.900.000,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.265.034,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.110.738.600,00	
2.09.3.25.3.27.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.110.738.600,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.005.794.400,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	958.889.300,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	952.117.300,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.772.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	34.712.000,00	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	34.712.000,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.041.700,00	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	9.073.700,00	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	1.968.000,00	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1.151.400,00	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1.151.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	926.077.780,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	151.330.300,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4.100.000,00	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	4.375.000,00	
3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	125.000.000,00	
3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	7.886.300,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	9.969.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	774.747.480,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	185.000.000,00	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	432.250.560,00	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	19.956.900,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	137.540.020,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	118.949.700,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.967.700,00	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	3.520.100,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	56.447.600,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	53.338.000,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6.760.000,00	
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.354.500,00	
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	37.688.500,00	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	3.535.000,00	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	5.644.000,00	
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	5.644.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	30.234.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	30.234.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.234.000,00	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	21.000.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	13.293.200,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000,00	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.100.000,00	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	7.818.200,00	
3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	2.200.000,00	
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3.535.000,00	
3.27.06.2.02.0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	2.083.200,00	
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	4.375.000,00	
3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	4.375.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	71.458.500,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	71.458.500,00	
3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	25.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	45.578.500,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.944.931.020,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.873.600,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	698.100,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.518.300,00	
3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	365.400,00	
3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.896.000,00	
3.27.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.943.600,00	
3.27.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	452.200,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.022.675.008,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.022.300.008,00	
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	375.000,00	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	263.000,00	
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	263.000,00	
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	447.600,00	
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	447.600,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.618.050,00	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.034.100,00	
3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.583.950,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.727.000,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.037.900,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.515.200,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.288.900,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.300.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.241.000,00	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.978.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.976.000,00	
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.390.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.530.982.440,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.113.840,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.274.868.600,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.344.322,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.620.982,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.882.340,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.186.100,00	
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.654.900,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.072.208.750,00	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.072.208.750,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	12.372.900,00	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	12.372.900,00	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12.372.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.014.553.280,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.989.553.280,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.891.259.960,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.095.543.320,00	
3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	2.750.000,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	25.000.000,00	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25.000.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	142.424.800,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	138.024.800,00	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	62.374.800,00	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.500.000,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	74.150.000,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.400.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.400.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	331.543.000,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	331.543.000,00	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	187.328.000,00	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	144.215.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	91.651.400,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	91.651.400,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	53.345.300,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	38.306.100,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	703.092.800,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	703.092.800,00	
3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	18.560.800,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	425.000.000,00	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	259.532.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.776.570.570,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.979.700,00	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.400,00	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	2.990.000,00	
3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.989.300,00	
3.30.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3.000.000,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.431.450.000,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.428.450.000,00	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.999.998,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.999.998,00	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.490.000,00	
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.903.500,00	
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105.586.500,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.709.300,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.715.400,00	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.887.100,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.550.000,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.736.800,00	
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.508.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.312.000,00	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.802.400,00	
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.599.200,00	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.203.200,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.654.272,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.300,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.653.972,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.484.900,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.454.600,00	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.014.600,00	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.911.700,00	
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.104.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.390.300.600,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.250.744.980,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.250.744.980,00	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	37.462.000,00	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	109.900.180,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.061.067.000,00	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.300.000,00	
3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	39.015.800,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	39.455.800,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	39.455.800,00	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	9.455.800,00	
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	30.000.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.099.820,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.099.820,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.099.820,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	36.652.553.518,00	
4.01.2.13.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	1.223.714.758,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.223.714.758,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.090.819.058,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	182.788.500,00	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	330.801.313,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	577.229.245,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	132.895.700,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	110.983.700,00	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	21.912.000,00	
4.01.2.13.0.00.01.0002	Bagian Hukum	1.017.637.100,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.017.637.100,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	316.455.200,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	384.582.200,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	316.599.700,00	
4.01.2.13.0.00.01.0003	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	8.778.837.247,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.502.387.700,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.222.090.400,00	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	246.848.900,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	33.448.400,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	276.449.547,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	176.449.547,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	62.695.900,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.876.800,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	23.876.847,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100.000.000,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000,00	
4.01.2.13.0.00.01.0004	Bagian Umum	24.130.677.536,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.130.677.536,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.900,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.900,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.913.794.696,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.912.144.696,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.400.000,00	
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.200.000,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.056.000,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.888.200,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.518.200,00	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.864.400,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	414.705.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.833.200,00	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.555.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.692.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.717.900,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.717.900,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.748.519.929,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	438.600,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.138.912.500,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.553,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.579.168.276,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.257.643.179,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	419.405.479,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	548.231.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.006.000,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	984.365.981,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	239.715.981,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.650.000,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.952.917.851,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.361.971.411,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.345.521.240,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	245.425.200,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	222.262.100,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	140.649.900,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.700.000,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	79.912.200,00	
4.01.2.13.0.00.01.0005	Bagian Organisasi	718.403.700,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.673.600,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.351.600,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.347.000,00	
4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	
4.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3.300.000,00	
4.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.925.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.210.900,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.172.250,00	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80.038.650,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	604.519.200,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	169.374.700,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	221.381.900,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	181.900.100,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	18.555.000,00	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	13.307.500,00	
4.01.2.13.0.00.01.0006	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	783.283.177,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	783.283.177,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	166.352.400,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	54.668.000,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	111.684.400,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	616.930.777,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248.943.600,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	201.323.177,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	166.664.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	31.617.298.275,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	31.617.298.275,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.455.503.575,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.202.069.545,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25.200.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.415.323.250,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	452.947.295,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	75.000.000,00	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	233.599.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.327.312.700,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	238.696.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	265.399.400,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	258.452.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	284.681.700,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	280.083.300,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	541.310.600,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	277.131.500,00	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	264.179.100,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.230.574.475,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.291.924.000,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	131.400.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	304.647.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	72.369.675,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	430.233.800,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.521.722.950,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.521.722.950,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4.632.513.305,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.529.513.305,00	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	103.000.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.161.794.700,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.387.325,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.396.500,00	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.757.400,00	
4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	870.000,00	
4.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.519.200,00	
4.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.404.225,00	
4.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.440.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.910.053,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.236.235.053,00	
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	675.000,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.400.000,00	
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.400.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.091.800,00	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.205.000,00	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	166.886.800,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.870.400,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.463.200,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.593.300,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.321.400,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.220.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.551.500,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.086.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	171.436.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.679.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.520.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.837.100,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	2.737.500,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.099.600,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.685.650,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.420.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.265.650,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.603.825,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.659.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.751.600,00	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	23.257.600,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.094.570,00	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.840.455,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	13.172.008.547,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.722.878.947,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	374.129.600,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	6.077.515.600,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6.077.515.600,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	748.950.000,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.799.900,00	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	453.749.850,00	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	47.400.050,00	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17.700.000,00	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	82.250.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	55.700.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.400.000,00	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.400.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	78.300.100,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	23.250.000,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	55.050.100,00	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	8.450.000,00	
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8.450.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	655.502.230,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	250.855.600,00	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.750.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40.680.600,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.000.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	154.425.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.255.630,00	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.000.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	153.255.630,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	240.391.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.000.000,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	229.391.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.673.063.370,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.051.500,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.900.000,00	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.900.000,00	
5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.225.000,00	
5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.750.000,00	
5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	946.500,00	
5.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1.330.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.065.918.962,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.065.202.162,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	716.800,00	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	800.000,00	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	800.000,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.907.100,00	
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66.907.100,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.504.469,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	957.500,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.600.130,00	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.701.400,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.022.300,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.393.000,00	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.956.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.719.139,00	
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	780.000,00	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.375.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.168.705,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.288.400,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.880.305,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.371.234,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.971.234,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.341.400,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.928.800,00	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	274.400,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.098.200,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.040.000,00	
5.02	KEUANGAN	20.103.261.150,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	20.103.261.150,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.102.025.100,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	661.918.900,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.422.250,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.222.250,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	47.738.450,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.127.500,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	11.560.450,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	22.725.800,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	447.749.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	56.802.700,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8.570.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	199.937.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	71.742.600,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.315.200,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10.078.800,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11.467.200,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.330.400,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	16.533.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	26.469.800,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	183.007.600,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	42.450.600,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.007.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.342.200,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.000.000,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1.000.000,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	26.512.000,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	14.695.800,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.001.000.000,00	
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	56.161.600,00	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6.161.600,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	50.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.402.565.558,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.402.565.558,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	78.000.000,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	25.000.000,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.000.000,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	160.262.800,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	10.000.000,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	392.400.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	100.000.000,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.000.000,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.436.571.242,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60.000.000,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.331.516,00	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.340.254.444,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.340.254.444,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	34.000.000,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	25.153.700,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	19.176.000,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	292.495.813,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	214.998.200,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	166.000.000,00	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	10.000.000,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	105.581.607,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1.009.955.936,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.549.088,00	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	16.871.900,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	384.027.000,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	51.445.200,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.258.416.048,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.541.600,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.384.900,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.356.400,00	
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	997.000,00	
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.411.100,00	
5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.472.000,00	
5.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	920.200,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.334.126.639,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.332.614.639,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.512.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.580.800,00	
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.580.800,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.896.100,00	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84.896.100,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.896.100,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.008.100,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.926.900,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.957.700,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.036.500,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.997.900,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.852.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.117.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.249.282,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.249.282,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.321.400,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.659.600,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.661.800,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.804.127,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.994.500,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.300.485,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.509.142,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
5.03	KEPEGAWAIAN	6.573.919.900,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.573.919.900,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.295.599.763,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	548.714.963,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	65.319.000,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	7.284.000,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	250.000.000,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	226.111.963,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	467.231.700,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	467.231.700,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	245.354.200,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	243.098.500,00	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.255.700,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.298.900,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19.862.900,00	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.036.600,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	12.004.500,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.394.900,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.278.320.137,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.103.500,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.387.100,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.399.400,00	
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.067.000,00	
5.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.600.000,00	
5.03.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	650.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.781.138.303,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.780.238.303,00	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	900.000,00	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000,00	
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.694.500,00	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.854.000,00	
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.540.500,00	
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.300.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.034.200,00	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.017.200,00	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.361.600,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.360.000,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.974.400,00	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.128.000,00	
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	439.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.907.100,00	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.817.600,00	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.089.500,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.843.734,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.843.734,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.098.800,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.709.400,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.103.600,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.285.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	380.642.200,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	380.642.200,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	248.785.800,00	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	19.097.500,00	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	215.813.300,00	
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	13.875.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	131.856.400,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	131.856.400,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	749.865.700,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	749.865.700,00	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	749.865.700,00	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	232.740.500,00	
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	203.189.800,00	
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	29.550.700,00	
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	517.125.200,00	
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	293.099.300,00	
5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	180.839.700,00	
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	43.186.200,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	9.170.978.050,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	9.170.978.050,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.725.511.310,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.678.634.910,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	92.433.550,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	38.563.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	53.087.500,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	37.657.900,00	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.407.843.460,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	49.049.500,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	46.876.400,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.426.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	42.450.400,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	303.821.000,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.596.800,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5.596.800,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	298.224.200,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4.830.400,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43.811.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	179.388.200,00	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.194.600,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.141.645.740,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.443.200,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.769.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.822.500,00	
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	898.600,00	
6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
6.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.404.000,00	
6.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	898.600,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.894.761.000,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.890.600.000,00	
6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.650.000,00	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.511.000,00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	897.600,00	
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	897.600,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.245.700,00	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.425.000,00	
6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78.148.700,00	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.672.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.296.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.754.000,00	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.590.800,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.407.400,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.398.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.878.400,00	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.022.800,00	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.490.600,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.528.800,00	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.304.000,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.538.000,00	
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.686.800,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.294.838,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.688.700,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.606.138,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.178.602,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.246.200,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.382.702,00	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.480.400,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.089.300,00	
6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	76.500.000,00	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.480.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	69.897.724.900,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kepanjenkidul	12.689.858.076,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	203.495.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	102.495.600,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	64.999.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.496.600,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	101.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.689.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.311.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.016.362.240,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	731.420.140,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.102.300,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	702.317.840,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	284.942.100,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	273.029.200,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.912.900,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.470.000.236,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	700.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.150.700.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.150.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	700.000,00	
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.724.900,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.724.900,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.231.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.906.400,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.973.900,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.873.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.176.600,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.531.600,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.520.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.249.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.135.400,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.135.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.556.136,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.684.736,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	664.871.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.852.600,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.414.100,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.582.500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.856.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Kepanjenkidul	1.831.448.882,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	449.864.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	433.639.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.675.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	399.964.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.225.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	150.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.075.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.286.230.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.234.260.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.909.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	822.500.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	376.850.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	51.970.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	51.770.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	200.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.354.882,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	75.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.146.950,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.146.950,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.281.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.342.600,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.806.500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.063.200,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.650.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.419.100,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.245.600,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.245.600,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.993.532,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.993.532,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.462.400,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.377.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.085.400,00	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Ngadirejo	852.089.263,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	190.034.280,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.736.280,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.190.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.546.280,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14.298.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.298.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	557.473.900,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498.539.100,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.300.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	383.663.100,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.576.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	58.934.800,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	53.734.800,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.581.083,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.050.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	525.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	525.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	525.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.976.350,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.976.350,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.357.333,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.063.600,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.449.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.739.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.105.033,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.883.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.883.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.391.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.391.800,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.397.600,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.397.600,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Sentul	1.307.489.441,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	292.948.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	267.268.800,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.100.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	265.168.800,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.680.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.680.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	887.759.800,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.184.800,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.459.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	542.500.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259.225.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60.575.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	56.775.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.800.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.780.841,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.140.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.140.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.346.541,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.840.041,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.325.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.391.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.790.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.800,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.194.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.194.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.300,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.980.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.520.300,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Kauman	1.274.515.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	288.240.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	262.265.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.675.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	258.590.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.975.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	850.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.125.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	876.068.500,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	816.068.600,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.550.300,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	561.018.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.500.300,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.999.900,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	56.749.900,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.250.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.206.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.070.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.325.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.745.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	835.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	835.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.474.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.826.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.268.500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.970.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.813.100,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.596.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.056.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.056.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.012.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.012.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.558.600,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.978.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.580.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Tanggung	1.424.976.641,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	322.740.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	305.650.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	295.450.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	17.090.800,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.090.800,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	942.076.341,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	881.851.841,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.926.841,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	825.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29.925.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60.224.500,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	54.474.500,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.750.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.159.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	760.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	380.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	863.600,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	863.600,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.263.600,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.263.600,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.629.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.533.600,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.920.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.334.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.154.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.687.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.217.400,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.217.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.425.700,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.947.500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.478.200,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Bendo	1.227.550.976,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	285.628.860,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	255.750.360,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.725.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	251.025.360,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.878.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.064.600,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.813.900,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	835.831.798,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	777.399.798,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.999.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	458.100.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	295.299.998,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	58.432.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	53.783.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.649.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.090.318,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.963.600,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	931.200,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.032.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.206.800,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.206.800,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.102.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.912.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.856.500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.317.200,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.707.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.308.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.636.918,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.636.918,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.090.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.090.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.891.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.570.800,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.320.200,00	
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Kepanjenlor	1.172.032.821,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	255.819.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	233.827.600,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.277.600,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	225.550.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.992.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.992.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	813.459.921,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	754.351.421,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.381.421,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	600.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	139.970.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.108.500,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	55.267.500,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.841.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.753.300,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.820.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	910.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	910.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	877.200,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	877.200,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.166.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	728.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.844.800,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.806.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.364.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.423.200,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.225.700,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.225.700,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.464.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.915.800,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.378.200,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Sukorejo	14.830.766.701,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.286.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	133.436.400,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	78.436.500,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.999.900,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	111.850.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.850.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.011.961.973,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.803.114.095,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.536.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.965.589.535,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	783.987.760,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	208.847.878,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	183.847.078,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25.000.800,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.573.518.328,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.336.800,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.668.400,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.668.400,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.976.500.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.975.000.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.663.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.238.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.425.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.383.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.103.600,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.525.800,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.331.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.318.100,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.350.800,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.219.800,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.424.400,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.795.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.120.928,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	758.120.928,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.294.100,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.761.900,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.383.300,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.929.400,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.219.500,00	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Pakunden	1.518.151.925,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	355.629.200,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	293.755.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.025.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	281.730.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61.874.200,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.174.200,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.700.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.018.582.800,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	952.152.600,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.812.200,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	833.425.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88.915.400,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	66.430.200,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	62.917.700,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.512.500,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.939.925,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.665.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	945.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	945.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	945.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.594.200,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.463.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.318.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.756.500,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.155.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.589.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.589.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.023.925,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.023.925,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.122.600,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.995.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.096.100,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.031.500,00	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Blitar	851.619.780,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	194.773.200,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.480.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.900.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.580.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.293.200,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	743.200,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.550.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	593.771.300,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	473.138.300,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.548.300,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	394.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60.590.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	120.633.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	115.877.200,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.755.800,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.075.280,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.388.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	748.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.260.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.260.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.472.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.456.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.502.800,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.955.200,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.308.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.250.500,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.257.280,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.257.280,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.697.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.397.500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.300.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Tlumpu	865.064.623,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	155.619.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.700.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.700.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	131.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.919.400,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.719.400,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.200.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	576.266.900,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	497.490.700,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.960.500,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	288.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188.530.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	78.776.200,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	74.926.200,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.850.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.178.323,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.563.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.312.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.251.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.255.400,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.255.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.783.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.703.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.001.500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.118.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.110.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.218.300,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	878.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.739.323,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.739.323,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.770.200,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.770.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.067.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.787.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.280.000,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Turi	733.937.121,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.304.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	129.992.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.432.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	120.560.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.312.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.980.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.332.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	464.131.800,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	392.496.500,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.896.300,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	227.500.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	148.100.200,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	71.635.300,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	68.335.300,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.501.321,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	400.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	400.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.881.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.099.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.704.100,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.171.600,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.752.400,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.589.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.589.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.609.396,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.609.396,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.941.325,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.060.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668.300,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.213.025,00	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Karangsari	996.522.225,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	223.060.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	192.910.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.505.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	182.405.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.150.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.350.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.800.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	656.557.725,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	570.558.125,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.261.600,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370.240.400,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.056.125,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	85.999.600,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.999.600,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.904.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.640.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.260.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.260.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.997.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.053.100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.006.500,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.010.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.656.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.507.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.010.100,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.589.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.589.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.748.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.748.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.669.700,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.128.500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.736.800,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.804.400,00	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Sukorejo	2.122.447.200,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	489.206.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	439.906.800,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.246.800,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	432.660.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	49.300.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.700.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.600.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.500.905.900,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.421.000.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.194.202.400,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	181.797.600,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	79.905.900,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	74.955.900,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.950.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.334.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.621.700,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.301.700,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.260.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.753.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.503.900,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.999.700,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.015.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.005.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.254.400,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.956.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.019.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.010.900,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.010.900,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.272.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.272.400,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.416.100,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.085.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.578.200,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.752.900,00	
7.01.0.00.0.00.02.0007	Kelurahan Tanjungsari	1.700.132.825,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	388.651.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	338.055.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.840.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	329.215.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50.596.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.680.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.916.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.191.459.400,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.116.509.400,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.561.600,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	965.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.947.800,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	74.950.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.950.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.022.425,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.640.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.260.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.260.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.541.825,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.184.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.935.300,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.287.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.935.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.238.325,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	962.200,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.111.600,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.111.600,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.999.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.999.500,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.469.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.171.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.837.800,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.460.700,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sananwetan	13.551.482.190,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.075.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.189.900,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	65.761.400,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.428.500,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	45.885.100,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.272.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.613.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.348.988.340,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.072.753.940,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.104.700,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	370.508.880,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	669.140.360,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	276.234.400,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	255.445.400,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.789.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.035.418.850,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.350.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.200.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.150.000,00	
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	1.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.184.576.250,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.183.776.250,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	800.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300.000,00	
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	630.000,00	
7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	630.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.503.300,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.802.300,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.701.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.393.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.439.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.002.700,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.096.500,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.156.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.315.400,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	630.300,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	515.467.500,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.467.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.188.500,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.713.500,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798.475.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.009.900,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.557.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.137.900,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.314.500,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Gedog	2.054.740.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	487.608.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	435.760.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.110.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.650.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	51.848.500,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.639.800,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.208.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.405.703.800,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.332.399.900,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.079.900,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	875.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415.320.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.303.900,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	63.385.900,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.918.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	161.427.700,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.133.400,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.133.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.823.300,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.954.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.485.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	630.300,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.991.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.991.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.200.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.400,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.309.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.493.500,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.816.100,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Plosokerep	1.100.522.600,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	238.156.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	209.602.800,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.750.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	201.852.800,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.553.500,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.639.800,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.913.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	688.581.700,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	629.290.900,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.920.900,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	440.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167.370.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	59.290.800,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	51.627.300,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.663.500,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.784.600,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.092.800,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.092.800,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.050.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.713.700,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.210.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.746.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.860.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.134.900,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	630.300,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.611.600,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.611.600,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.800.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.459.800,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.405.600,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.054.200,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Klampok	1.152.014.700,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	263.423.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	230.680.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.350.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.330.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.743.400,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.639.800,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.103.600,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	771.794.100,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	716.890.800,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	22.240.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	549.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	145.650.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	54.903.300,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	48.353.300,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.550.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.797.200,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.320.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.013.600,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.013.600,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.452.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.222.500,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.573.600,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.834.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.100.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.707.200,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.260.600,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.517.400,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.517.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.770.800,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.934.800,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.403.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.065.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.338.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Sananwetan	2.407.066.700,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	577.569.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	532.090.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	517.290.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	45.479.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.670.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.809.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.669.142.100,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.600.148.600,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	47.483.700,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.250.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	302.664.900,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	68.993.500,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	65.993.500,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.355.600,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.081.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.081.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.052.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.100,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.433.300,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.234.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	630.300,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.534.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.534.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.634.700,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.798.700,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.083.100,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.173.400,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.909.700,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Rembang	762.354.200,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.936.900,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	132.630.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.920.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	124.710.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18.306.900,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.639.800,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.667.100,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	475.418.300,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	409.518.300,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.393.300,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	245.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.125.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	65.900.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	57.975.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.925.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.999.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.899.000,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.899.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.427.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.036.800,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.730.200,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.694.500,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.875.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.075.900,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.260.600,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.543.200,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.543.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.600.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.559.800,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.729.600,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.830.200,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Karangtengah	1.505.983.100,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	339.599.700,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	312.750.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	301.750.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.849.700,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.239.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.610.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.009.785.900,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	939.997.400,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31.685.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	600.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	308.311.600,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	69.788.500,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	61.348.500,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.440.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.597.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.650.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.650.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.825.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.825.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.412.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.644.300,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.356.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	658.500,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.450.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.450.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.858.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.058.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.081.300,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.289.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.792.300,00	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Bendogerit	1.964.957.910,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	434.313.550,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	372.921.550,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.561.550,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	361.360.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	61.392.000,00	
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.392.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.284.422.600,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.203.045.600,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.738.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.125.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42.307.600,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	81.377.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	72.800.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.577.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	246.221.760,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	480.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	600.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.358.400,00	
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.358.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.386.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.524.600,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.297.300,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.503.400,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.395.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.912.400,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.754.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.317.200,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.102.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.910.200,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.305.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.728.760,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.892.760,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.836.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.350.700,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.956.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.394.700,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.340.902.500,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.340.902.500,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.675.802.700,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.675.802.700,00	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.250.000,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	678.702.200,00	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75.000.000,00	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	49.042.300,00	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	230.100.000,00	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	615.468.200,00	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.350.000,00	
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	4.390.000,00	
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	5.500.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	677.256.100,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	677.256.100,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.308.000,00	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60.498.300,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	603.449.800,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	103.402.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.402.200,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	13.300.000,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.102.200,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	336.683.600,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	336.683.600,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	145.762.200,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.921.400,00	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.000.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.267.034.100,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.267.034.100,00	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.950.000,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	279.293.500,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800.000.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	181.790.600,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.280.723.800,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.817.900,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.723.200,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.187.500,00	
8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	1.200.000,00	
8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.320.000,00	
8.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	3.187.200,00	
8.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2.200.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.981.850.000,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.980.600.000,00	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.250.000,00	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.450.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.450.000,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.402.100,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.780.000,00	
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	87.622.100,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.379.740,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.303.400,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.098.340,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.520.600,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.176.800,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.696.600,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.934.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.045.000,00	
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.605.000,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.491.400,00	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	36.386.000,00	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.105.400,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.259.670,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.856.000,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.403.670,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.072.990,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.976.800,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.996.000,00	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.852.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.963.600,00	
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318.284.590,00	



 Walikota Blitar



 Syauqul Muhibbin